

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amrani, H., & Al, M. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Rajawali Pers.
- Budhijanto, D. (2010). *Hukum telekomunikasi, penyiaran, dan teknologi informasi : regulasi dan konvergensi*. Refika Aditama.
- Dr. Sinta Dewi Rosadi, SH., L. . (2015). *Cyber law : aspek data privasi menurut hukum internasional, regional, dan nasional* (Cet. 1). Refika Aditama.
- Huda, N. (2005). *Hukum Tata Negara Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kristiyanti, C. T. S. (2009). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika.
- Raharjo, S. (1983). *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru.
- Rasjidi, L., Sos, S., & Putra, I. B. W. (2003). *Hukum sebagai suatu sistem*. Remaja Rosdakarya.
- Satjipto Raharjo. (2002). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Ghaila Indonesia.
- Sukarton, E. D. N. (2022). *Perlindungan Privacy di Era New Normal Digital Lifestyle Terkait Cyber Power* (Rachmi (Ed.)). Refika Aditama.
- Sutantya, L. R., Hadhikusuma, R., & Sumantoro. (1996). *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentukbentuk Perusahaan*. Raja Grafindo Persada.
- Syahrani, H. R. (1991). *Rangkuman intisari ilmu hukum*. Cipta Aditya Bakti.
- Takdir, S. H. (2013). Mengenal Hukum Pidana. *Penerbit Laskar Perubahan*, 4–5.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Amandemen IV Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan Pokok Kearsipan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen

Perusahaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020.

C. Sumber-sumber lainnya

AzwarAzrul. (1996). *Menuju Pelayanan Kesehatan Yang Lebih Bermutu*. Yayasan Penerbitan Ikatan Dokter Indonesia.

Bernadetha Aurelia Oktavira. (2021). *Data Aplikasi PeduliLindungi Diduga Bocor, Ini Langkah yang Bisa Dilakukan*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/data-aplikasi-pedulilindungi-diduga-bocor--ini-langkah-yang-bisa-dilakukan-lt616e85b3814ac>

Bygrave, L. A. (1998). Data Protection Pursuant To The Right To Privacy in Human Rights Treaties. *Internasional Journal of Law and Information Technology*, 6.

Daniar Supriyadi. (2017). *Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitaspemanfaatannya-oleh--daniar-supriyadi/>

Dewi Rosadi, S., & Gumelar Pratama, G. (2018). Urgensi Perlindungan data Privasi dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4(1), 88–110. <https://doi.org/10.25123/vej.2916>

Edmon Makarim, author. (2013). Hybrid Paradigm From European and America Concerning Privacy and Personal Data Protection in Indonesia. *Indonesia Law Review*, 2.

Fastyaningsih, A., Priyantika, D., Widyastuti, F. T., Kismartini, K., & Herawati, A. R. (2021). Keberhasilan Aplikasi PeduliLindungi terhadap Kebijakan Percepatan Vaksinasi dan Akses Pelayanan Publik di Indonesia. *GEMA PUBLICA: Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 6(2), 95–109.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. PT Bina Ilmu.

Hasil Pencarian - KBBI Daring. (n.d.). Diambil 30 Maret 2022, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sertifikat>

- Kang, J. (1996). *Information Privacy in Cyberspace Transactions*. 1193–1294.
- Kesehatan, K. (2020). *Pedulilindungi*. Pedulilindungi.
<https://www.pedulilindungi.id/>
- Latumahina, R. E. (2014). Aspek Hukum perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya. *Jurna Gema Aktualita* 3.
- M. Agus Yozami. (2021). *Begini Hukumnya Menggunakan NIK Orang Lain*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-hukumnya-menggunakan-nik-orang-lain-lt610b8e43b2fe5?page=2>
- Mertokusumo, S. (1991). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty.
- Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana (VIII)*. Rineka Cipta.
- Nazir, M., & Sigmumbang, R. (2003). *Metode penelitian*. Ghaila Indonesia.
- Nuraini, R. (2020). *Indonesia.go.id - Kasus Covid-19 Pertama, Masyarakat Jangan Panik*. <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik>
- Nurdinisari, R. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Dan Data Pribadi Pengguna Telekomunikasi Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi Khususnya Dalam Menerima Informasi Promosi Yang Merugikan*. Universitas Indonesia.
- Nurhidayati, N., Sugiyah, S., & Yuliantari, K. (2021). Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi. *Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen*, 5(1), 39–45.
<https://doi.org/10.31294/WIDYACIPTA.V5I1.9447.G4579>
- Prosser, W. L. (1960). Privacy: A Legal Analysis. *California Law Review*, 48.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2021). putusan.mahkamahagung.go.id
- Rafael La Porta. (1999). *Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics*. 59.
- Rosadi, S. D. (2009). *Cyberlaw Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. Widya Padjajaran.
- Rosadi, S. D., & Pratama, G. G. (2018). URGENSI PERLINDUNGANDATA PRIVASIDALAM ERA EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA. *Veritas et Justitia*, 4(1), 88–110. <https://doi.org/10.25123/VEJ.V4I1.2916>
- Sautunnida, L. (2018). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan malaysia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20.2.
- Setianti;, E. P. I. W. D. M. F. B. L. (2015). *Privasi 101: Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data dan Surveilans Komunikasi*. [//perpustakaan.elsam.or.id/index.php?p=show_detail&id=15049](http://perpustakaan.elsam.or.id/index.php?p=show_detail&id=15049)
- Sirie, M. I. (2018). The Mandatory Designation of a Data Protection Officer in

- Indonesia's Upcoming Personal Data Protection Law. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 5.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Solove, D. J. (1992). *Understanding Privacy*. Cambridge: Harvard University Press.
- Tacino, & Maruli, M. J. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Dinamik: Jurnal Ilmiah Hukum*.
- Vaksin COVID-19 | Covid19.go.id. (2020). <https://covid19.go.id/tentang-vaksin-covid19>
- Valentina, F., Mandiana, S., & Widjiastuti, A. (2022). Kebocoran Data Pribadi Pada Aplikasi Pedulilindungi. *Gema Aktualita*, 9(1), 33–41.
- Wacks, R. (1989). *Personal information : privacy and the law*. Oxford: Clarendon Press.
https://catalog.library.vanderbilt.edu/discovery/fulldisplay/alma991004879239703276/01VAN_INST:vanui
- Waldo, J. (2007). *Engaging Privacy and Information Technology in A Digital Age*. Washington D.C: National Research Council of The National Academies,.
- Warsudi, A. (2021). *Pembuat dan Penjual Sertifikat Vaksin Covid Palsu Ditangkap Ditreskrimsus Polda Jabar*. <https://jabar.inews.id/berita/pembuat-dan-penjual-sertifikat-vaksin-covid-palsu-ditangkap-ditreskrimsus-polda-jabar/all>
- Westin, A. F. (1968). *Washington and Lee Law Review Privacy And Freedom*. 25(1). <https://scholarlycommons.law.wlu.edu/wlulr/vol25/iss1/20>